Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

INTISARI ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Keaslian Penelitian 13

BAB II **18**

A. Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara 18

B. Teori Pengawasan Administrasi Negara 19

C. Teori Pengawasan Intern Pemerintah dan Kedudukan BPKP Sebagai APIP 20

D. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara 22

E. Audit Investigatif dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 24

BAB III **26**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 26

B. Bahan Penelitian 27

C. Cara Pengumpulan Data 28

D. Cara Analisis Data 29

E. Sistematika Penulisan 29

Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB IV 31

A. Keabsahan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 31

1. Sumber Wewenang BPKP: Delegasi Kekuasaan Pemerintahan Presiden 32

2. Batas Materi Wewenang: Menghitung Bukan Menyatakan 39

3. Pengakuan Normatif yang Konsisten dan Model Tiga Lapis Kewenangan 51

4. Analisis Sumber Kewenangan BPKP dalam Audit PKKN 57

B. Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP dalam Pemenuhan Unsur "Merugikan Keuangan Negara" pada Putusan Perkara Korupsi PT Timah 63

1. Pintu Masuk LHAPKKN ke Persidangan dan Beban Pembuktian 64

2. Mutu Laporan: Penugasan, Metodologi Penghitungan, dan Indepedensi Auditor 70

3. Pengujian di Persidangan dan Penilaian Majelis Hakim 80

4. Sifat Kekuatan Pembuktian LHAPKKN dan Penilaian Akhir 91

BAB V 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106